

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur secara daring di bidang pemerintahan khususnya pada bagian Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan, maka dapat disimpulkan :

1. Praktik Kerja Profesi Apoteker dapat membekali calon Apoteker dengan pandangan, wawasan dan pengetahuan mengenai pekerjaan kefarmasian di lingkungan pemerintahan.
2. Pelaksanaan Praktik Kerja Profesi Apoteker ini membantu mempersiapkan calon Apoteker untuk memasuki dunia kerja sebagai tenaga kesehatan yang profesional dan berwawasan luas meskipun hanya secara daring.
3. Calon Apoteker mampu memahami struktur organisasi Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, dimana Dinas Kesehatan terdiri dari Bidang Kesehatan Masyarakat, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Bidang Pelayanan Kesehatan, dan Bidang Sumber Daya Kesehatan.
4. Praktik Kerja Profesi Apoteker membantu calon Apoteker mampu memahami peran, fungsi, tugas, wewenang, dan tanggung jawab Apoteker Bidang Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.

5. Praktik Kerja Profesi Apoteker membantu calon Apoteker dalam memahami kasus dan permasalahan terkait kefarmasian serta penyelesaiannya sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat di Provinsi Jawa Timur.

5.2 Saran

Berdasarkan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur secara daring di bidang pemerintahan khususnya pada bagian Kefarmasian dan Perbekalan Kesehatan, maka dapat diberikan saran :

1. Dalam pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker, mahasiswa diharapkan untuk lebih mempersiapkan diri dengan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur serta perundang-undangan farmasi terkait.
2. Dalam pelaksanaan Praktik Kerja Profesi Apoteker, mahasiswa diharapkan untuk dapat lebih aktif dan tanggap agar memperoleh pengetahuan dan pemahaman yang lebih mengenai hal- hal yang berkaitan di bidang pemerintahan khususnya pada bidang Sumber Daya Kesehatan di Seksi Kefarmasian dan Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Rumah Tangga di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur.

DAFTAR PUSTAKA

- BPOM RI, 2018, *Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk.03.1.33.12.12.8195 Tahun 2012 tentang Penerapan Pedoman Cara Pembuatan Obat yang Baik*, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Jakarta.
- BPOM RI, 2012, *Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.03.1.23.04.12.2206 Tahun 2012 tentang Cara Produksi Pangan yang Baik untuk Industri Rumah Tangga*, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Jakarta.
- BPOM RI, 2019, *Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang Sering Disalahgunakan*, Badan Pengawas Obat dan Makanan, Jakarta.
- BPOM RI, 2021, *Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, Dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi*, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, Jakarta.
- BPOM RI, 2022, *Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2022 tentang Pedoman Tindak Lanjut pengawasan Obat dan Bahan Obat*, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, Jakarta.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan*, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.

- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika*, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, 2002, *Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1426 Tahun 2002 tentang Pengelolaan Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan*, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan*, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Departemen Kesehatan Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan*, Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, 2022, Visi dan Misi Dinkes Jatim, Diakses pada 14 Mei 2022, https://dinkes.jatimprov.go.id/index.php?r=site/berita_detail&id=1
- Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alkes Kemenkes RI, 2020, *Pedoman Pelaksanaan Program Gema Cermat*, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.

- Gubernur Jawa Timur, 2016, *Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 74 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur*, Gubernur Jawa Timur, Surabaya.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2011, *Modul Penggunaan Obat Rasional*, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2013, *Pedoman Teknis Penemuan dan Tata Laksana Hipertensi*, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2014, *SIPNAP User Manual untuk Apotek*, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2019, *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perencanaan dan Pengadaan Obat Berdasarkan Katalog Elektronik*, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2019, *Petunjuk Teknis Standar Pelayanan Kefarmasian Di Puskesmas*, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2017, *Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/422/2017 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019*, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2010, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1189/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Produksi Alat*

Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga,
Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.

Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2010, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1190/MENKES/PER/VIII/2010 tentang Izin Edar Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik In Vitro dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga,* Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.

Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2015, *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi,* Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.

Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2016, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Republik Indonesia,* Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.

Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2017, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Cara Pembuatan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga yang Baik,* Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.

Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2017, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2017 tentang Izin Edar Alat Kesehatan, Alat Kesehatan Diagnostik In Vitro dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga,* Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.

Menteri Kesehatan Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika,* Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.

- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Naroktika*, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2021, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pedoman Penggunaan Antibiotik*, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah, 1999, *Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan*, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah, 2007, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten*, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah, 2009, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian*, Jakarta.
- Presiden Republik Indonesia, 2012, *Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional*, Jakarta.